

Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sdm Sebagai Variabel Moderasi Pada Kementerian Agama Se Sulawesi Selatan

Ernawati

¹Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

¹muhisra817@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah sistem pengendalian Internal, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kementerian Agama Se Sulawesi Selatan. Kemudian untuk melihat apakah kompetensi SDM memoderasi hubungan sistem pengendalian Internal, penerapan standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang yang terbagi dalam 25 Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Selatan dan peneliti menggunakan Regresi Linear Berganda (Moderated Regression Analysis) sebagai alat untuk menganalisis data, dan diolah dengan program statistik SPSS 24.0. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X1), penerapan standar akuntansi pemerintah (X2) dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM (Z) tidak memoderasi hubungan sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah, Teknologi Informasi, SDM, Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze whether the Internal control system, the implementation of government Accounting Standards, information technology Utilization affect on the Quality of Financial Reports at the Ministry of Religious Affairs in South Sulawesi. Then to find out whether HR competence moderates the relationship between the Internal control system, the implementation of government Accounting Standards, information technology Utilization on the Quality of Financial Reports.

This type of research is quantitative research, uses primary data, the data source is obtained from the results of respondents' answers to the distributed questionnaires. The population used in this study was 100 people divided into 25 the Ministry of Religious Affairs in South Sulawesi and researchers used Moderated Regression Analysis as a tool to analyze data, and processed it with the SPSS 24.0 statistical program. The results of partial hypothesis testing show that the Internal Control System (X1), the application of accounting standards (X2), information technology Utilization (X3) has a positive and significant effect. on the quality of financial reports and HR Competency (Z) does not moderate the relationship between the internal control system, the application of accounting standards and the use of information technology to the quality of financial reports.

Keywords : Internal Control System, Government Accounting Standards, Information Technology, HR, Financial Reports.

PENDAHULUAN

Institusi Pemerintah sebagai organisasi sektor publik merupakan organisasi atau badan usaha yang berkewajiban untuk melaporkan Performance melalui pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan Parlemen. Untuk itu salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan adalah berkaitan dengan financial report [Kinranayanti dan Erawati, \(2016\)](#). Berlandaskan PP No. 8 Tahun 2006 laporan keuangan yaitu suatu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara atau daerah dalam suatu periode. Fenomena terkait menguatnya tuntutan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja instansi/lembaga agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan cerminan mengenai aktivitas pemerintahan, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas [Wati, dkk. \(2014\)](#).

Keterandalan laporan keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Hal tersebut dilihat dari pandangan atas laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tanda laporan keuangan tersebut dipandang andal dan bermutu yaitu saat BPK memberi pandangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun faktanya dalam pemeriksaan BPK tahun 2020 ditemukan 6.970 kasus dengan jumlah kerugian negara pada kasus tersebut mencapai angka 16,62 triliun, hal ini terjadi dikarenakan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPK, RI).

Sejalan dengan pernyataan tersebut kondisi terjadi pada Kementerian Agama, dimana hasil temuan BPK Tahun 2020 (yang tertuang dalam LHP Tahun 2020) menunjukkan bahwa adanya masalah bagaimana pengelolaan asset dimana sebesar Rp. 383.699.139.926,28 berupa Aset Tetap pada 38 satuan kerja masih dikuasai oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa (BPK, 2020). Tidak hanya sampai disitu, temuan lainnya yaitu terdapat kesalahan penganggaran/peruntukan belanja Kementerian Agama sebesar Rp5.975.146.028. Kondisi lain yang juga melibatkan Kementerian Agama adalah dalam hal pencatatan nilai persediaan, dimana Persediaan yang berasal dari nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah direalisasikan dan belum menunjukkan nilai persediaan yang sebenarnya, dengan demikian dalam hal pencatatan asset belum sesuai dengan standar yang berlaku (BPK, 2020). Berangkat dari fenomena pada Kementerian Agama diatas menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang disajikan belum memadai, hal ini tentu saja tidak terlepas dari unsur-unsur lain yang ikut berkontribusi atas penyusunan laporan keuangan. Salah satu unsur yang ikut mempengaruhi adalah sistem pengendalian internal, dimana laporan keuangan yang disusun perlu dilakukan pengawasan dan pengontrolan yang memadai agar pemerintah dapat menjalankan tugas keuangan secara efektif sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Penerapan Standar Akuntansi. Hal ini dikarenakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah [Nugraheni dan Subaweh, \(2008\)](#). Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik, dimana penggunaan teknologi dapat membantu orang untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menyebarkan informasi dengan mudah dan akurat [Kadir, \(2006\)](#). Penelitian yang dilakukan [Indrawan, dkk. \(2017\)](#) menemukan bahwa teknologi informasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai positif menunjukkan pengaruh yang searah yaitu dimana apabila pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam suatu entitas semakin canggih maka meningkat pula kualitas laporan keuangan pada suatu entitas dalam hal ini adalah koperasi. Senada dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan [Ismunawan dan Andayani \(2019\)](#) dalam penelitiannya menemukan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Kompetensi SDM juga menjadi pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh sektor publik, dimana kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan karena SDM merupakan salah satu unsur penting yang melakukan proses penginputan dalam kedalam sebuah sistem dan akan menjalankan Standar Akuntansi Pemerintahan, teknologi informasi dan rekonsiliasi. Penelitian mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di instansi pemerintah diantaranya pernah dilakukan oleh [Mamahit et. al \(2017\)](#) yang menemukan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. [Khairuddin \(2017\)](#) menggunakan Kompetensi SDM sebagai variabel pemoderasi dikarenakan bahwa Pengendalian intern, Penerapan Standar akuntansi dan pemanfaatan teknologi Informasi tentu saja hanya bisa berjalan dengan baik ketika SDM memiliki Kompetensi yang bagus, sehingga keberadaan SDM yang kompeten akan menjadi penunjang dari kualitas laporan keuangan.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Selatan sangat memerlukan berbagai faktor pendukung terhadap kualitas laporan keuangan agar dapat menjalankan tugas keuangan secara efektif oleh pihak berwajib guna meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan institusi, karena anggaran yang digunakan berhak dikontrol secara baik penggunaannya dilihat dari hasil pelaporan

keuangan oleh yang berwenang mengurus hal tersebut. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Determinasi Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM sebagai variabel moderasi pada Kementerian Agama Se Sulawesi Selatan.”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam teori keagenan (agency theory) dimana hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (participal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut [Jensen & Meckling, \(1976\)](#). Manajer (agent) dalam hal ini adalah pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan yang bersumber dari APBN/APBD lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek dari organisasi di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (principal) yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Teori Kepemimpinan (Stewardship Theory)

Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan pada behavior atau pola manusia (model of man), dan mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi, dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi pencapaian sebuah tujuan. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi [Raharjo, \(2007\)](#). Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam suatu organisasi sebagai pelayan (agen) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya [Donaldson dan Davis, \(1989;1991\)](#) dalam [Yonyon, \(2013\)](#).

Theory of Reasoned Action (TRA)

Theory of reasoned action (TRA) merupakan teori yang dikembangkan oleh [Ajzen dan Fhisbein \(1980\)](#) dimana teori tersebut menjelaskan bagaimana hubungan antara sikap dan perilaku, [Jogiyanto, \(2007\)](#). Model TRA ini sendiri merupakan gabungan dari dua model, yaitu model minat perilaku mempengaruhi perilaku dan model minat perilaku. Dalam Theory of reasoned action (TRA) meyakini bahwa minat dapat memprediksi kegiatan-kegiatan yang beranekaragam [Jogiyanto, \(2007\)](#). Model minat perilaku terbentuk dari dua fungsi penentu yang berhubungan dengan faktor pribadi dan faktor sosial, dimana keduanya membentuk dua konstruk variabel independen yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) dan norma subjektif (subjective norm), kemudian ditambah dengan satu variabel dependen yaitu minat perilaku [Jogiyanto, \(2007\)](#).

Pengendalian Intern

[Reeve Fees \(2006:235\)](#) menyatakan bahwa Pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Tujuan dibangunnya sistem pengendalian keputusan kepada agent tersebut [Jensen & Meckling, \(1976\)](#). Manajer (agent) dalam hal ini adalah pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan yang

bersumber dari APBN/APBD lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek dari organisasi di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (principal) yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Teori Kepemimpinan (Stewardship Theory)

Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan pada behavior atau pola manusia (model of man), dan mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi, dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi pencapaian sebuah tujuan. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi [Raharjo, \(2007\)](#). Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam suatu organisasi sebagai pelayan (agen) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya [Donaldson dan Davis, \(1989; 1991\)](#) dalam [Yonyon, \(2013\)](#).

Theory of Reasoned Action (TRA)

Theory of reasoned action (TRA) merupakan teori yang dikembangkan oleh [Ajzen dan Fhisbein \(1980\)](#) dimana teori tersebut menjelaskan bagaimana hubungan antara sikap dan perilaku, [Jogiyanto, \(2007\)](#). Model TRA ini sendiri merupakan gabungan dari dua model, yaitu model minat perilaku mempengaruhi perilaku dan model minat perilaku. Dalam Theory of reasoned action (TRA) meyakini bahwa minat dapat memprediksi kegiatan-kegiatan yang beranekaragam [Jogiyanto, \(2007\)](#). Model minat perilaku terbentuk dari dua fungsi penentu yang berhubungan dengan faktor pribadi dan faktor sosial, dimana keduanya membentuk dua konstruk variabel independen yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) dan norma subjektif (subjective norm), kemudian ditambah dengan satu variabel dependen yaitu minat perilaku [Jogiyanto, \(2007\)](#).

Pengendalian Intern

[Reeve Fees \(2006:235\)](#) menyatakan bahwa Pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Tujuan dibangunnya sistem pengendalian

intern adalah untuk melindungi aset negara baik berupa fisik maupun data, memelihara catatan dan dokumen, menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan handal, menjamin bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAP dan meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi. SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Indikator Pengendalian Intern

Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dimana SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Teknologi informasi (Information Technology) adalah sama dengan teknologi lainnya, hanya informasi merupakan komoditas yang diolah dengan teknologi tersebut. Dalam hal ini, teknologi mengandung konotasi memiliki nilai ekonomi. Teknologi pengolah informasi ini memang memiliki nilai jual, seperti contohnya teknologi data base, dan security, kesemuanya dapat dijual. Bentuk dari teknologi adalah kumpulan pengetahuan (knowledge) yang diimplementasikan dalam tumpukan kertas (stacked of papers), atau sekarang dalam bentuk CD-ROM. Tumpukan kertas inilah yang didapatkan, jika seseorang membeli sebuah teknologi dalam bentuk patent lainnya [Rahardjo, \(2000\)](#). Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna. Oleh karena itu, teknologi informasi menyediakan begitu banyak kemudahan dalam mengelola informasi dalam arti menyimpan, mengambil kembali dan pemutahiran informasi.

Sumber Daya Manusia (SDM)

[Wirawan \(2009\)](#) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. [Wiley \(2002\)](#) dalam [Sukmaningrum \(2012\)](#) mendefinisikan “sumber daya merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Menurut Hasibunan, sumber daya manusia adalah kemampuan terhadap daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh suatu individu. Berangkat dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah orang-orang yang dipekerjakan di suatu organisasi atau perusahaan dimana nantinya akan menjadi pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek kuantitas dan kualitas.

Sumber daya manusia merupakan faktor keberhasilan pada tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka tujuan-tujuan organisasi tersebut sulit untuk dicapai. Sumber daya dikatakan berkualitas apabila memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.

[Hutapea dan Thoha \(2008\)](#) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu:

1. Keterampilan (skill)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Sikap (attitude)

Kualitas Laporan Keuangan Pengertian Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

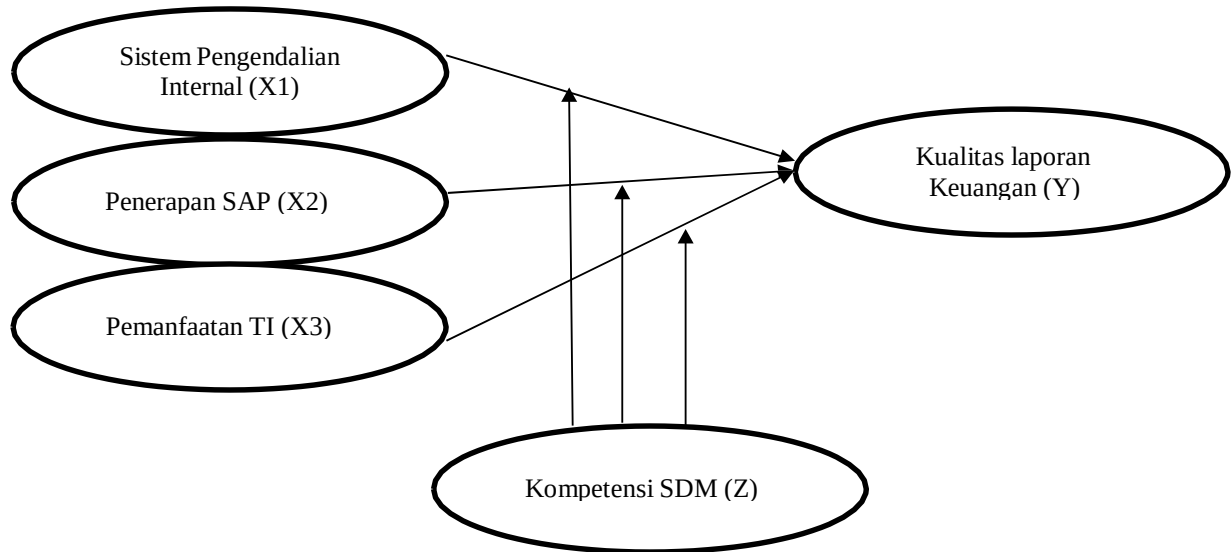
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual menyatakan "karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya". Adapun kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami. [Mardiasmo \(2002\)](#) menjelaskan bahwa pada umumnya tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: "1) kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship), 2) akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting), 3) perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information), 4) kelangsungan organisasi (viability); 5) hubungan masyarakat (public relation); dan 6) sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)". Laporan keuangan memainkan peran penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada publiknya dalam masyarakat yang demokratis.

Adapun Komponen Laporan Keuangan merujuk pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual menyatakan bahwa komponen laporan keuangan pemerintahan daerah meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan

KERANGKA KONSEPTUAL



Hipotesis

- H1 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H4 : Kompetensi SDM memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H5 : Kompetensi SDM memperkuat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H6 : Kompetensi SDM memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dengan mengumpulkan hasil kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pegawai Kementerian Agama se Sulawesi Selatan yang diambil dengan pendekatan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 16 data dianalisis dengan Uji Hipotesis Penelitian.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan :

$$\text{Model 1 } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + e$$

$$\text{Model 2 } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + b_5X_1.Z + b_6X_2.Z + b_7X_3.Z + e$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 = Sistem Pengendalian Intern

X2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

Z = Kompetensi SDM (Pemoderasi)

X1*Z = Interaksi variabel Moderasi

X2*Z = Interaksi variabel Moderasi

X3*Z = Interaksi variabel Moderasi

a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)

e = error yang ditolerir (5%)

Moderated Regression Analysis (MRA) ini dilakukan melalui uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik) Liana (2009) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji tStatistik)

Dari ke tiga variabel independen (variabel Xa, variabel Xb, variabel Xc dan variabel moderat) yang dimasukkan dalam regresi, jika variabel Xa, variabel Xb, variabel Xc dan variabel moderat (interaksi antara Xa dan Xb) memberikan nilai koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Xc adalah variabel moderating. Jika variabel moderat Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (penjelas) secara individual mampu menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Jika nilai t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% dimana kriteria penerimaan dan penolakan Ho adalah :

- Ho ditolak jika t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel
- Ho diterima jika t-hitung (+) < (-) t-tabel atau t-hitung (-) > (+) t-tabel

b. Koefisien Determinan (Adjusted R2)

Koefisien determinasi (Adjusted R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (Adjusted R2) Nilai (Adjusted R2) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai Adjusted R2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (Adjusted R2) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui google form dengan link : <https://forms.gle/8U3qqwiNaR2QPruv6>, yang disebarakan melalui 25 kantor dibawah Kementerian Agama di Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden yang dituju adalah 100 orang responden yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Kantor), Kepala bagian keuangan dan pegawai penyusun Laporan keuangan Pemerintah (LKP). Dari 100 yang disebarakan, tidak semuanya kembali dan dapat diolah. Dari total 100 kuesioner (100 %) yang disebar, kuesioner yang kembali dan

dapat diolah adalah sebanyak 85 kuesioner (85%) dan 15 kuesioner (15%) yang tidak kembali.

Analisis Pengujian Hipotesis

Uji Parsial

Setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas data dapat diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditunjukkan pada tabel pengujian parsial dibawah ini:

Uji Parsial (t) Model 1

Variabel	Unstandardized B	t	Sig
Sistem Pengendalian Intern (X1)	0,313	3,046	0,003
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	0,349	3,790	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,211	3,726	0,008
Komptensi SDM (Z)	0,143	2,825	0,006
Konstanta	-0,063	-0,248	0,805

Sumber : Output SPSS 24.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian,

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 24 for Windows, dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\text{Model 1 } Y = -0,063 + 0,313X_1 + 0,349X_2 + 0,211X_3 + 0,143Z$$

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (penjelas) secara individual mampu menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Jika nilai t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data pada tabel 8 diatas sehingga diperoleh :

- 1) Variabel X1 (Sistem Pengendalian Intern) memberikan nilai koefisien parameter (t-hitung) sebesar 3.046 dengan tingkat signifikansi 0,003 (<0,05). Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Sistem Pengendalian Intern < 0,05 (0,003< 0,05) dan nilai t-hitung > 1,985 (3.046 > 1,985).
- 2) Variabel X2 (Penerapan Standar Akuntansi) memberikan nilai koefisien parameter sebesar dengan tingkat signifikansi 0,000 (<0,05). Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Penerapan Standar Akuntansi < 0,05 (0,000> 0,05) dan nilai thitung > 1,985 (3.790 > 1,985).
- 3) Variabel X3 (Pemanfaatan Teknologi Informasi) memberikan nilai koefisien parameter (t-hitung) sebesar 3.726 dengan tingkat signifikansi 0,008 (<0,05). Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Sistem Pengendalian Intern < 0,05 (0,008< 0,05) dan nilai t-hitung > 1,985 (3.726 > 1,985).
- 4) Variabel Z (Kompetensi SDM) memberikan nilai koefisien parameter sebesar dengan tingkat signifikansi 0,000 (<0,05). Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kompetensi SDM $< 0,05$ ($0,006 > 0,05$) dan nilai thitung $> 1,985$ ($2,825 > 1,985$)

Untuk model regresi ke 2 berdasarkan hasil uji regresi berganda dengan menggunakan MRA untuk menguji variabel pemoderasi yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 24 for Windows, dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\text{Model 2 } Y = -1,376 + 1,073X_1 - 0,617X_2 + 0,2701X_3 + 0,464Z - 0,181X_1*Z + 0,234X_2*Z + 0,122X_3*Z$$

Dimana:

- 1) Variabel X1 (Sistem Pengendalian Intern) $0,179 > 0,05$ tidak signifikan, sedangkan interaksi antara X_1*Z dengan nilai $0,341 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X1 tidak memiliki interaksi dengan variabel Z atau disebut Homologizer Moderasi (Moderasi Potensial).
- 2) Variabel X2 (Penerapan Standar Akuntansi) $0,487 > 0,05$ tidak signifikan, sedangkan interaksi antara X_2*Z dengan nilai $0,278 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X2 tidak memiliki interaksi dengan variabel Z atau disebut Homologizer Moderasi (Moderasi Potensial).
- 3) Variabel X3 (Pemanfaatan teknologi Informasi) $0,229 > 0,05$ tidak signifikan, sedangkan interaksi antara X_3*Z dengan nilai $0,393 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X3 tidak memiliki interaksi dengan variabel Z atau disebut Homologizer Moderasi (Moderasi Potensial).

Berdasarkan penejelasan diatas dapat buatkan tabel estimasi untuk model 2 seperti dibawah ini:

Uji Parsial (t) Model 2

Variabel	Unstandarized B	t	Sig
Konstanta	-1,376	-0,476	0,635
Sistem Pengendalian Intern (X1)	1,073	1,358	0,179
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	-0,617	-0,698	0,487
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,701	1,212	0,229
Komptensi SDM (Z)	0,464	0,647	0,52
Moderat 1	-0,181	-0,959	0,341
Moderat 2	0,234	1,092	0,278
Moderat 3	-0,122	0,86	0,393

Sumber : Output SPSS 24.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2022

Uji Koefisien Determinasi R² (Koefisien Determinasi)

Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data yang ada pada tabel dibawah ini :

Uji Koefisien Determinasi R² (Koefisien Determinasi) Model 1 dan 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square
Model 1	0,905	0,818	0,809
Model 2	0,907	0,822	0,806

Sumber : Output SPSS 24.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2022

Tabel menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square (R²) model 1 sebesar 0,809 atau 80,9%. Nilai Adjusted R Square (R²) model 1 ini nilai yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan

dapat dijelaskan oleh variabel independen Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM, sedangkan sisanya ($100\% - 80,9\% = 18,1\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termaksud dalam penelitian, sedangkan untuk nilai Adjusted R Square (R^2) model 2 sebesar 0,806 atau 80,6%. Nilai Adjusted R Square (R^2) model 2 ini nilai yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen Sistem Pengendalian Internal, penerapan standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM, sedangkan sisanya ($100\% - 80,6\% = 18,4\%$)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji determinasi kualitas laporan keuangan yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Pengendalian intern sangat diperlukan agar memberikan keyakinan yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena dapat memenuhi asas ketertiban, wujud ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk perwujudan dari asas ketertiban tersebut dapat dibuktikan dengan ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan dengan akurasi laporan keuangan yang high quality. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa dari 9 item pernyataan, dimensi lingkungan pengendalian memiliki skor yang paling tinggi pada pernyataan terkait dengan pemberian contoh dalam berperilaku sesuai kode etik, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaannya contoh nyata menjadi barometer pasti dalam peningkatan kualitas dari laporan keuangan dengan tetap berpedoman pada kode etik dan job description yang telah ditentukan.

Berangkat dari teori stewardship, dimana pemerintah dan masyarakat mempunyai tujuan yang sama. Pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan laporan keuangan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem pengendalian intern pemerintah dibangun oleh Steward sebagai bentuk pelayanan yang memastikan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Selain itu sistem pengendalian internal juga diterapkan Steward untuk menghindari segala bentuk penyimpangan/kekeliruan karena tindakan manusia yang mungkin terjadi di dalam organisasi yang akan menghambat tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan [Mulyati, dkk., \(2019\)](#).

Temuan penelitian adanya pengaruh Sistem Pengendalian Inter terhadap kualitas laporan keuangan ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh [Sundari dan Rahayu \(2019\)](#); [Modo, dkk. \(2019\)](#); [Agustian dan Bagianto \(2019\)](#)

menemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian [Mulyati, dkk. \(2019\)](#) yang menyatakan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan terbukti.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti bahwa aparat pemerintah yang menerapkan standar akuntansi yang baik memiliki kualitas laporan keuangan yang baik sehingga penerapan standar merupakan dasar yang bisa digunakan bagi semua instansi yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Hasil analisis data diperoleh bahwa dari 10 item pernyataan, dimana dimensi penerapan berbasis akrual, hal ini berarti dalam pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintah untuk setiap Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Selatan sudah menggunakan basis akrual dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Penerapan standar akuntansi pemerintah berkaitan dengan teori keagenan (Agency Theory) bahwa pemerintah bertindak sebagai agent harus memenuhi kebutuhan masyarakat selaku principal dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan penerapan standar akuntansi pemerintah yang efektif, memudahkan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan [Purwaniati dan Subaweh \(2008\)](#); [Christanti \(2012\)](#); [Kusuma \(2010\)](#) dan [Nugraeni dan Budiantara \(2015\)](#) menemukan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dimana jika standar akuntansi sudah diterapkan dengan baik maka kualitas laporan keuangan juga akan menjadi lebih baik dan bebas dari bias dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (H3 diterima). Dengan adanya teknologi yang semakin maju dan canggih pemerintah pusat maupun daerah diamanatkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan akan layanan yang baik dan profesional sehingga semua pihak secara terbuka dapat mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat. Untuk itu, Kementerian Agama sebagai salah satu instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Dengan mengoptimalkan perangkat komputer dan penggunaan software aplikasi serta didukung oleh pemeliharaan yang rutin maka satuan kerja akan mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan dan berkualitas. Adapun dimensi yang paling tinggi skornya dari item pernyataan mengenai pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan komputer dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini juga berarti bahwa semua satuan kerja Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Selatan sudah menggunakan komputer dalam penggunaan dan pengolahan data menjadi laporan keuangan. Meski demikian item yang dengan skor paling rendah pada item pernyataan terkait dengan konsistensi pemeliharaan komputer yang digunakan, ini menjadi sinyal bagi semua Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Selatan untuk memperhatikan penggunaan komputer, dikarenakan data-data keuangan harus tersimpan dan melakukan langkah antisipasi dalam bentuk membuat data cadangan untuk meminimalisir adanya kerusakan data dan hilangnya data pada komputer yang digunakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori TRA, dimana setiap keputusan yang diambil harus didasari atas keyakinan dan tentunya melakukan evaluasi atas keputusan diambil, sehingga keputusan-keputusan yang tidak tepat bisa diminalkan dengan mempertimbangkan kondisi dimasa lalu. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [Indrawan, dkk. \(2017\)](#); [Ismunawan dan Andayani \(2019\)](#) dalam penelitiannya menemukan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan, yang berarti bahwa penggunaan teknologi yang memadai dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat.

4. Kompetensi SDM memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak memoderasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan SDM sebagai human capital dalam sebuah organisasi atau lembaga yang keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, dimana SDM dengan high human capital akan secara konsisten memberikan kualitas pelayanan yang profesional, akan tetapi keberadaan SDM pada Kementerian Agama di Sulawesi Selatan terbukti tidak mempengaruhi hubungan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan basis keilmuan yang dimiliki baik Kasubag dan staf tidak mendukung untuk mendukung untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memadai, hal ini tentu saja didorong oleh bidang keilmuan yang bukan basic dari ekonomi khususnya akuntansi, hal itu terlihat dari persentase bidang keilmuan responden yang rata-rata bukan latar belakang akuntansi melainkan pendidikan, teknik sipil, teknik elektro, pendidikan agama, dan lainnya. Sehingga meskipun kompetensi tingkat pendidikan yang dimiliki SDM nya bagus jika tidak didukung dengan bidang ilmu yang memadai maka kualitas laporan keuangan menjadi tidak akurat, hal ini tentu saja didasari pada kemampuan melakukan penalaran dan analisis yang tajam atas temuan atau masalah yang berkaitan dengan data-data laporan.

5. Kompetensi SDM memperkuat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak memoderasi hubungan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan kesalahan SDM dalam menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Adapun tujuan penerapan standar akuntansi yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan setingkat Kementerian bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, akan tetapi jika kompetensi yang dimaksud tidak didasarkan pada basis keilmuan maka kontribusinya tidak akan memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang akan dibuat, hal itu tentu didasarkan pada basis keilmuan merupakan hal yang mendasari bagi SDM untuk melakukan klasifikasi akun, pencatatan dan pelaporan data keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik tentu akan mampu bekerja secara optimal sehingga segala tujuan dari pemerintah daerah dapat tercapai, salah satunya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

6. Kompetensi SDM memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan Pemanfaatan teknologi informasi berkaitan dengan proses pengolahan data, pengolahan informasi, serta bagaimana proses kerja yang dilakukan secara elektronik serta bagaimana pemanfaatannya untuk kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh semua elemen masyarakat, sehingga dengan pemanfaatan teknologi informasi semua pihak secara terbuka dapat mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat. Kementerian Agama sebagai salah satu instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pasti memiliki transaksi yang beragam. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan dan juga pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian dari SDM yang dimiliki yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga

jika SDM sebagai driver tidak memiliki kompetensi yang memadai yang didukung dengan latar belakang keilmuan yang tidak mumpuni maka mustahil kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan. Dari keseluruhan dimensi yang digunakan item pernyataan yang paling tinggi pada dimensi tanggungjawab, dimana setiap pegawai bekerja sesuai tupoksi atau job description yang telah ditentukan, meski demikian pelatihan dan pengalaman yang masih kurang menjadi kendala dalam memahami pekerjaan yang ada.

KESIMPUNLAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di bab pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini berarti lingkungan pengendalian yang berfokus pada pemberian contoh nyata merupakan bagian terpenting dari peningkatan kualitas dari laporan keuangan.
2. Penerapan standar akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini berarti dalam hal melakukan pencatatan terkait dengan aset, pendaoatan dan belanja sudah menggunakan basis acrual sehingga laporan yang dibuat adalah laporan keuangan yang sesuai standar dan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini berarti semua pencatatan data-data yang ada sudah menggunakan tehnologi dalam pengolahannya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu dan akuntabel.
4. Kompetensi SDM tidak memoderasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan sebaik apapun sebuah sistem itu dibuat jika SDM sebagai drivernya tidak memiliki basis keilmuan yang sesuai bidangnya maka apa yang menjadi tujuan tidak bisa tercapai, termaksud dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan
5. Kompetensi SDM tidak memoderasi hubungan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dimoderasi kompetensi SDM, hal ini dikarenakan dalam Penerapan standar akuntansi diperlukan kompetnsi SDM yang memadai, sehingga Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak tepat waktu dan akurat.
6. Kompetensi SDM tidak memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini SDM sebagai penggerak teknologi informasi tidak memiliki kompetensi yang memadai dan mumpuni untuk menjalankan aplikasi yang berbasis komputerisasi atas laporan keuangan maka mustahil kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan.

Saran

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian, berikut ini disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pegawai Kementerian Agama sebaiknya perlu memahami secara komprehensif terkait sistem pengendalian internal yang merupakan bagian integral dari kegiatan basic manajemen sehingga akan memperoleh kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang baik dan meminimalisir temuan-temuan oleh BPK.
2. Merekrut pegawai dengan basis keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga kompetensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja.
3. Untuk peneliti selanjutnya, bisa menambahkan variabel budaya organisasi untuk melihat efek terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, Ahmad. 2006. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Khairuddin, I. (2017). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mamahit, F.A., Jullie, J. S. & Ventje, I. (2017) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (pada SKPD Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill", Vol. 8 No. 1 (2017): 75-85.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam. 2008. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan", Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1, Vol 13.
- Nugraeni dan M. Budiantara. 2015. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja, J. Din. Ekon. dan Bisnis, vol. 12, no. 1, pp. 18-32, 2015.
- Rahardjo, Budi, 2000. Implikasi Teknologi Informasi dan Internet Terhadap Pendidikan, Bisnis dan Pemerintahan, Makalah, Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Sukmaningrum, T. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP
- Sundari, H. dan S. Rahayu. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018), J. E-Proceeding Manag., vol. 6, no. 1, pp. 660-667.